

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2021



DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG

**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN**

Jl. Karya Asih No. 4 Lubuk Pakam 20514 Telp/Fax. (061) 7951849

Email: dinkes@deliserdangkab.go.id

Website: <https://dinkes.deliserdangkab.go.id>



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN**

Jalan Karya Asih Nomor 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telepon. (061) 7951849 Faks. (061) 7951849

E-mail: dinkes@deliserdangkab.go.id Website: https://dinkes.deliserdangkab.go.id

**KERTAS KERJA PENGUKURAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021**

1. INDEKS KELUARGA SEHAT (IKS)

Menurut Permenkes Nomor 39 Tahun 2016, perhitungan IKS meliputi :

$$IKS\ KAB = \frac{Jumlah\ keluarga\ dengan\ IKS > 0,800}{Jumlah\ seluruh\ keluarga\ di\ wilayah\ tsb}$$

$$IKS\ KAB = \frac{147.703}{441.577} = 0.33\ (TIDAK\ SEHAT)$$

2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Menurut Permenpan Nomor 14 Tahun 2017, perhitungan IKM adalah sebagai berikut:

Untuk menghitung IKM Dinas Kesehatan:

$$IKM\ Dinkes = \frac{Nilai\ Rata - Rata\ IKM\ UPT\ Dinkes + Nilai\ Rata - Rata\ IKM\ Dinkes}{2}$$

$$IKM\ Dinkes = \frac{83.45 + 82.79}{2} = 83.12\ (BAIK)$$

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

3. NILAI AKIP

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektur Kabupaten Deli Serdang menugaskan

timnya untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	
			Tahun sebelumnya	Tahun Berjalan
1	Perencanaan Kinerja	30	26,37	26,46
2	Pengukuran Kinerja	25	15,63	17,19
3	Pelaporan Kinerja	15	12,23	12,49
4	Evaluasi Internal	10	4,84	5,99
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	16,99	17,81
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,06	79,94

Lubuk Pakam, Februari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG**



**dr. ADE BUDI KRISTA
PEMBINA TK. I**

NIP. 19710313 200701 1 026

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82	220.556.883.387,00	83,12	206.054.716.762,00	101,37	93,42	Secara umum, permasalahan yang terjadi pada tahun 2021 adalah karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan anggaran yang lebih difokuskan pada percepatan penanganan dan vaksinasi COVID-19 serta intruksi penyelenggaraan kegiatan yang harus mematuhi protokol kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tetap menjalankan tupoksinya dalam rangka menjadikan masyarakat Deli Serdang Sehat khususnya di masa pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan tetap mematuhi peraturan/regulasi yang telah ditetapkan dan tidak lupa menjalankan protokol kesehatan
					Nilai AKIP	Poin	72		79,94		111,03			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Poin	72	313.846.876,00	76,06	308.175.160,00	105,64	98,19	Terjadinya dinamika perencanaan dan penganggaran yang begitu cepat karena kondisi pandemi COVID-19 dan adanya target vaksinasi COVID-19 menyebabkan beberapa kali terjadi pergeseran anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan vaksinasi COVID-19	Tetap melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dengan memedomani peraturan dan regulasi yang ada; Melibatkan seluruh pengelola program di setiap bidang/subbag/Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk berkolaborasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja; Berkoordinasi dengan OPD lain dalam rangka penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Jenis	6	145.413.616,00	6	140.208.300,00	100,00	96,42	Beberapa kali terjadi pergeseran anggaran dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 sehingga proses penyusunan perencanaan banyak yang tidak sesuai dengan timeline yang diberikan	1. Tetap melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan melakukan reviu Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dengan memedomani peraturan dan regulasi yang ada 2. Melibatkan seluruh pengelola program di setiap bidang/subbag/Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk berkolaborasi dalam penyusunan dokumen perencanaan 3. Memaksimalkan pendampingan tata kelola perencanaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kemenkes RI bekerjasama dengan World Bank
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	Dokumen	7	168.433.260,00	9	167.966.860,00	128,57	99,72	Beberapa dokumen laporan capaian kinerja terlambat proses penyusunannya dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang berakibat pada tersitanya waktu tim penyusun laporan capaian kinerja yang harus melakukan pergeseran anggaran berkali-kali dan adanya target vaksinasi sehingga menyita waktu dan perhatian petugas kesehatan baik di Kabupaten maupun di Kecamatan	1. Tetap melaksanakan penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dengan memedomani peraturan dan regulasi yang ada 2. Melibatkan seluruh pengelola program di setiap bidang/subbag/Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk berkolaborasi dalam penyusunan dokumen laporan capaian kinerja 3. Berkoordinasi dengan OPD lain dalam rangka penyelesaian dokumen laporan capaian kinerja
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Dokumen Pelaporan Keuangan	%	100	215.661.655.926,00	100	201.933.667.772,00	100,00	93,63	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	2300	214.100.733.286,00	2385	200.489.615.332,00	103,70	93,64	-	-
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	OB	856	1.416.883.640,00	627	1.308.563.440,00	73,25	92,36	-	-

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	Dokumen	1	144.039.000,00	1	135.489.000,00	100,00	94,06	Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pengurus barang dan bendahara Puskesmas terutama terkait data yang dibutuhkan dalam Laporan Keuangan	Memaksimalkan komunikasi dan koordinasi antara pihak yang terlibat dalam Laporan Keuangan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur/Pegawai	%	100	1.501.170.200,00	100	1.448.984.000,00	100,00	96,52	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	2300	1.501.170.200,00	2300	1.448.984.000,00	100,00	96,52	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Kedinasan	%	100	1.515.587.483,00	100	1.060.642.545,00	100,00	69,98	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19 (mengalami refocussing)	Tetap melaksanakan kegiatan dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan komponen instalasi listrik dan jaringan	Jenis	3	107.766.000,00	3	107.361.000,00	100,00	99,62	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	8	330.865.868,00	4	123.235.000,00	50,00	37,25	Beberapa barang yang diusulkan di P. APBD tidak sempat dieksekusi	Memaksimalkan barang yang sudah ada
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Paket	2	74.548.127,00	2	36.050.000,00	100,00	48,36	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19 (mengalami refocussing)	Memaksimalkan anggaran yang tersedia dan menginformasikan kepada seluruh pengelola program agar memaksimalkan belanja alat tulis kantor dan belanja habis pakai peralatan komputer yang tersedia pada masing-masing kegiatan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan	Jenis	8	53.051.544,00	8	30.012.050,00	100,00	56,57	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19 (mengalami refocussing)	Memaksimalkan anggaran yang tersedia dan menginformasikan kepada seluruh pengelola program agar memaksimalkan belanja cetakan dan penggandaan yang tersedia pada masing-masing kegiatan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan	Eksamplar	9752	41.120.000,00	6484	27.340.000,00	66,49	66,49	-	-
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Porsi	2844	63.794.784,00	2844	62.736.000,00	100,00	98,34	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	OH	1795	844.441.160,00	1202	673.908.495,00	66,96	79,81	Adanya wabah pandemi COVID-19 sehingga beberapa kegiatan luar daerah tidak dapat dilaksanakan	Menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan tetap melakukan protokol kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarpras Penunjang Fungsi Kedinasan	%	100	229.644.640,00	100	181.655.000,00	100,00	79,10	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19 (mengalami refocussing)	Tetap melaksanakan kegiatan dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia
				Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Jenis	3	69.780.640,00	3	68.520.000,00	100,00	98,19	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Unit	17	159.864.000,00	17	113.135.000,00	100,00	70,77	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang fungsi kedinasan	%	100	782.548.262,00	100	576.367.067,00	100,00	73,65		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis	6	126.940.800,00	4	47.228.507,00	66,67	37,21	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	69	57.506.600,00	66	30.665.000,00	95,65	53,32	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	Unit	180	598.100.862,00	137	498.473.560,00	76,11	83,34	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19 (mengalami refocussing)	Memaksimalkan anggaran yang tersedia
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset/Barang yang terpelihara fungsinya	%	100	552.430.000,00	63,88235294	545.225.218,00	63,88	98,70	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19 (mengalami refocussing)	Tetap melaksanakan kegiatan dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Unit	108	428.110.000,00	118	422.275.218,00	109,26	98,64	Masih adanya pemilik kendaraan dinas yang belum mengklaim biaya pengurusan pajak kendaraan	Memberitahukan secara berkala kepala pemilik kendaraan dinas untuk secara rutin mengklaim biaya pengurusan pajak kendaraan dinas
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jenis	2	124.320.000,00	2	122.950.000,00	100,00	98,90	-	-
			Meningkatkan Keluarga Sehat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,4	315.953.382.758,00	0,33	236.321.111.159,90	82,50	74,80	SDM Puskesmas harus membagi waktu kerja untuk pencegahan dan penanggulangan serta vaksinasi COVID-19 sehingga pelaksanaan intervensi keluarga cukup terbengkalai	1. Menggalang komitmen dari Kepala Puskesmas dalam pencapaian IKS termasuk pengalokasian dana dari BOK Puskesmas untuk melaksanakan intervensi keluarga serta didukung dengan Tim PIS-PK Kabupaten yang memonitor pelaksanaan serta pencapaian PIS-PK 2. Pembentukan Tim Bina Wilayah Binaan PIS-PK Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	25,38	76.020.166.761,00	89,29	41.131.967.650,90	351,80	54,11	1. Dikarenakan pandemi COVID-19 untuk akreditasi perdana di Puskesmas Tuntungan tidak dapat dilaksanakan (sesuai edaran dari menteri kesehatan bahwa akreditasi ditangguhkan) 2. Re-akreditasi (baik itu Puskesmas maupun RS) juga tidak dilaksanakan (sesuai edaran dari Menteri Kesehatan RI bahwa akreditasi ditangguhkan selama masa pandemi COVID-19)	Tetap dilakukan pembinaan akreditasi ke Puskesmas maupun RS dengan menggunakan dana APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
				Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Unit	1	3.357.684.177,00	1	2.075.511.366,90	100,00	61,81	Adanya penambahan dan pengurangan pekerjaan serta adanya penambahan waktu penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran sehingga mengakibatkan adanya belanja pada sub kegiatan ini yang belum terealisasi pada tahun 2021	Proses pembangunan Puskesmas Bangun Purba tetap dilaksanakan dan sudah selesai dilaksanakan pada awal tahun 2021. Untuk pembayarannya sudah dimasukkan dalam DPA Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang T.A. 2022
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Paket	4	595.000.000,00	4	590.351.000,00	100,00	99,22	-	-
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poskesdes	Paket	4	3.953.226.901,00	4	2.528.199.182,00	100,00	63,95	Pemeliharaan Poskesdes, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas tidak memiliki permasalahan. Permasalahan dijumpai pada kegiatan Rehabilitasi Puskesmas Labuhan Deli karena adanya penambahan dan pengurangan pekerjaan serta adanya penambahan waktu penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran sehingga mengakibatkan kegiatan ini belum terealisasi pada tahun 2021	Proses rehabilitasi Puskesmas Labuhan Deli tetap dilaksanakan dan sudah selesai dilaksanakan pada awal tahun 2021. Untuk pembayarannya sudah dimasukkan dalam DPA Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang T.A. 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah penyediaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jenis	4	1.280.000.000,00	4	1.109.580.000,00	100,00	86,69	Ketersediaan anggaran karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan beberapa belanja bersumber EARMARKING DAU belum terealisasi pada tahun 2021	Proses pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan tetap dilaksanakan dan sudah selesai dilaksanakan pada awal tahun 2021. Untuk pembayarannya sudah dimasukkan dalam DPA Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang T.A. 2022
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah penyediaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Paket	89	16.625.265.324,00	81	12.479.494.646,00	91,01	75,06	Ketersediaan anggaran karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan beberapa belanja bersumber EARMARKING DAU belum terealisasi pada tahun 2021	Proses pengadaan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tetap dilaksanakan dan sudah selesai dilaksanakan pada awal tahun 2021. Untuk pembayarannya sudah dimasukkan dalam DPA Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang T.A. 2022
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Paket	36	22.408.318.087,00	36	6.598.378.874,00	100,00	29,45	Perubahan harga yang terjadi di E-Katalog LKPP, perubahan kebutuhan alat kesehatan Puskesmas pada masa pandemi COVID-19 sehingga memprioritaskan alat kesehatan yang dibutuhkan terkait penanganan pandemi COVID-19	1. Memaksimalkan belanja alat kesehatan bersumber dari JKN Puskesmas khususnya bagi Puskesmas BLUD. 2. Mendata alat kesehatan yang tidak jadi dibeli karena dinamika harga dan situasi kondisi di masa pandemi dan mengusulkannya kembali pada perencanaan alat kesehatan tahun anggaran berikutnya
				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat dan vaksin	Paket	2	14.464.405.876,00	2	5.743.000.680,00	100,00	39,70	1. Untuk dana APBD dan DAK, harga HPS (Harga Perhitungan Sendiri) pada DPA Dinas Kesehatan lebih tinggi dari harga e-catalog sehingga terjadi kelebihan anggaran 2. Dikarenakan masa pandemi, maka stock bahan baku pada pabrikan tidak tersedia karena bahan baku yang tidak tersedia. Hal ini mengakibatkan proses pengadaan beberapa obat bersumber P. APBD tidak bisa terlaksana	Tim farmasi dan perbekalan obat menyusun HPS (Harga Perhitungan Sendiri) yang update dan tidak berpedoman kepada HPS lama untuk menghindari bias harga pada e-catalog. Penyusunan HPS (Harga Perhitungan Sendiri) dengan menyesuaikan harga pada e-catalog.

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket	3	12.800.316.743,00	3	9.683.982.593,00	100,00	75,65	Harga HPS pada DPA Dinas Kesehatan lebih tinggi dari harga e-catalog sehingga terjadi kelebihan anggaran	Tim farmasi dan perbekalan obat supaya menyusun HPS yang update dan tidak berpedoman kepada HPS lama untuk menghindari bias harga pada e-catalog. Penyusunan HPS adalah dengan menyesuaikan harga pada e-catalog
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasyankes	Paket	35	252.768.000,00	35	85.014.000,00	100,00	33,63	Alat kesehatan RSU Pancur Batu terlambat penyerahan data sehingga tidak dapat dilakukan kalibrasi tahun 2021 sementara di Sumatera Utara hanya ada satu instansi kalibrasi alat kesehatan yaitu BPFK Medan Provinsi Sumatera Utara	Alat kesehatan yang tidak jadi dikalibrasi diusulkan kembali untuk dikalibrasi pada tahun anggaran berikutnya dan sudah dilakukan komunikasi dengan BPFK Medan
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Mananan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman	Puskesmas	34	283.181.653,00	34	238.455.309,00	100,00	84,21	1. Kurangnya tenaga supir untuk melakukan distribusi obat dikarenakan bertambahnya kegiatan pengambilan vaksin COVID-19 ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2. Kurangnya tenaga administrasi di Instalasi Farmasi dikarenakan bertambahnya aktivitas di Instalasi Farmasi	1. Memaksimalkan waktu kerja tenaga supir dan memberdayakan tenaga administrasi untuk mengambil vaksin COVID-19 ke Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara 2. Mengusulkan penambahan tenaga supir untuk melakukan pendistribusian obat, bahan medis habis pakai dan vaksin ke Puskesmas 3. Mengusulkan penambahan tenaga administrasi untuk membuat laporan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	236.767.806.900,00	100	192.432.412.738,00	100,00	81,27	Masih dalam kondisi pandemi COVID-19	Tetap melaksanakan program/kegiatan sesuai tupoksi Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Orang	46072	1.903.366.138,00	43449	1.866.763.200,00	94,31	98,08	1. Kunjungan ibu hamil selama masa pandemi COVID-19 berkurang ke fasilitas pelayanan kesehatan 2. Kurangnya konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil	1. Kunjungan home visite terhadap ibu hamil dan melaksanakan kelas ibu hamil dengan jumlah yang terbatas dengan tetap mengikuti protokol kesehatan 2. Melakukan edukasi melalui kader untuk dapat memantau ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	43981	5.845.936.040,00	40792	3.562.628.652,00	92,75	60,94	1. Masih rendahnya protokol kesehatan pada kunjungan ibu bersalin selama masa pandemi COVID-19 ke fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Pemberian Vitamin K dan dan Vaksin Hepatitis masih rendah	1. Memberikan edukasi untuk memakai masker pada kunjungan ibu bersalin 2. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk pengadaan Vaksin Hepatitis
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Orang	44580	1.817.854.080,00	38574	529.786.058,00	86,53	29,14	1. Masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga masih ada orang tua yang takut ke fasilitas pelayanan kesehatan membawa anaknya untuk diimunisasi 2. Logistik vaksin rutin kurang 3. Kecemasan petugas dalam melayani pelayanan maternal neonatal di masa pandemi COVID-19	1. Tetap menyelenggarakan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan memedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 20219 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 2. Memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dalam penanganan pelayanan maternal neonatal
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	163205	4.156.342.007,00	146156	4.029.730.300,00	89,55	96,95	1. Masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga masih ada orang tua balita yang takut ke fasilitas pelayanan kesehatan membawa anaknya 2. Proses pembelajaran di kelompok Bermain/TK masih belum berjalan tatap muka karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19	1. Melaksanakan pelayanan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 2. Mengintegrasikan pelayanan kesehatan balita dengan program lainnya (memaksimalkan program lainnya untuk dilaksanakan secara serentak). Misalnya pada saat intervensi PIS-PK ke rumah-rumah masyarakat, petugas kesehatan tetap melakukan pelayanan balita bagi masyarakat yang memiliki anak balita.
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	362692	1.510.055.344,00	331470	1.435.593.740,00	91,39	95,07	Masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga proses pembelajaran belum berlangsung secara tatap muka 100%	Tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam upaya penjangkaran kesehatan anak usia sekolah dengan memedomani Surat Edaran dari Dirjend. P2P Kemenkes RI Tahun 2018 tentang Teknis Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	1587822	900.453.510,00	1326129	798.559.588,00	83,52	88,68	<p>1. Masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan kunjungan masyarakat khususnya usia produktif menurun</p> <p>2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat memeriksakan kesehatannya sebagai upaya deteksi dini terhadap penyakit</p> <p>3. Pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri terkendala akibat sekolah tutup selama masa pandemi COVID-19</p>	<p>1. Tetap melaksanakan upaya pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan menggunakan dana BOK Puskesmas</p> <p>2. Adanya dukungan dana desa dalam upaya pelayanan kesehatan pada usia produktif yang dilaksanakan di Posbindu yaitu dalam rangka pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</p> <p>3. Melakukan home visite ke desa dalam rangka pemberian tablet tambah darah dan pemeriksaan kesehatan di rumah</p>
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Orang	180351	1.333.241.340,00	175142	1.307.948.830,00	97,11	98,10	<p>1. Kunjungan posyandu lansia dan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan berkurang akibat pandemi COVID-19</p> <p>2. Masih belum maksimalnya penerapan protokol kesehatan dhi. pemakaian masker di masyarakat kelompok lanjut usia</p> <p>3. Kurangnya alat pemeriksa <i>screening</i> kesehatan lansia</p>	<p>1. Menganjurkan memakai dan memberi masker kepada kelompok lanjut usia karena merupakan kelompok yang beresiko terkena dampak COVID-19</p> <p>2. Melakukan kunjungan rumah untuk <i>screening</i> kesehatan lansia</p> <p>3. Dukungan dana desa untuk mengadakan alat pemeriksaan <i>screening</i> kesehatan bagi kelompok lanjut usia yaitu cek gula</p>
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	537213	582.109.428,00	474585	565.157.100,00	88,34	97,09	<p>Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya sebagai upaya deteksi dini terhadap penyakit</p>	<p>Tetap melaksanakan pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu adanya pemeriksaan awal (skrining) sebelum vaksinasi COVID-19 tentunya menjadi faktor pendukung dalam pelayanan kesehatan penderita hipertensi</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	42711	410.137.642,00	37445	347.404.038,00	87,67	84,70	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya sebagai upaya deteksi dini terhadap penyakit	Tetap melaksanakan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu adanya pemeriksaan awal (skrining) sebelum vaksinasi COVID-19 tentunya menjadi faktor pendukung dalam pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang	3247	541.665.499,00	2504	506.213.410,00	77,12	93,45	1. Masih kurangnya sosialisasi tentang orang dengan gangguan jiwa berat 2. Masih rendahnya kesadaran dan kemauan dari pihak keluarga pasien untuk datang ke Puskesmas atau fasyankes lainnya dikarenakan masih ada rasa malu memiliki keluarga dengan gangguan jiwa berat	Tetap melaksanakan upaya deteksi dini kepada pasien dengan gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	Orang	33638	1.161.111.066,00	21871	1.101.377.296,00	65,02	94,86	1. Belum optimalnya penjangkaran orang terduga tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit/Klinik; 2. Belum semua fasyankes mendapat Sosialisasi Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis	1. Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada orang terduga tuberkulosis beserta dengan seluruh keluarga/orang yang serumah dengan penderita tuberkulosis melakukan <i>screening</i> tuberkulosis; 2. Tetap melaksanakan upaya pelayanan kesehatan pada penderita tuberkulosis dengan memedomani Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan	Orang	58658	895.962.591,00	21298	699.974.040,00	36,31	78,13	1. Sebagai bagian dari kelompok sasaran orang dengan risiko terinfeksi virus HIV, belum seluruh ibu hamil diperiksa HIV 2. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka ditemukan beberapa hambatan dalam men-skruining orang dengan risiko terinfeksi virus HIV seperti pasien TBC, pasien IMS, penaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, transgender/waria dan pengguna napza suntik (penasun) 2. Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri masih kurang	Tetap melaksanakan upaya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV khususnya ibu hamil karena kelompok ini merupakan kelompok mayoritas dalam pencapaian target. Upaya pelayanan kesehatan dilakukan di seluruh Puskesmas; RSUD Drs. H. Amri Tambunan; RSU Pancur Batu; dan beberapa klinik yang telah menjadi layanan VCT
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	5	10.977.707.584,00	2	7.527.728.180,00	160,00	68,57	Salah satu KLB yang terjadi pada tahun 2021 adalah KLB keracunan makanan yang terjadi di Kecamatan Namorambe. Namun pada saat terjadi KLB tidak ditemukan lagi sisa makanan (sampel) yang terduga penyebab KLB dan identitas kependudukan penderita KLB.	Tetap melaksanakan upaya pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB dengan melakukan pemeriksaan laboratorium dan koordinasi bersama lintas sektoral
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Puskesmas	34	194.266.290,00	34	-	100,00	0,00	Krisis kesehatan akibat bencana terlambat dilaporkan ke Puskesmas maupun Dinas Kesehatan	Berkoordinasi dengan petugas kesehatan yang berada di desa/kecamatan yaitu Puskesmas dan jaringannya sesegera mungkin setelah mendapat informasi kejadian bencana sehingga data penduduk terdampak teregister di posko kesehatan dan berkoordinasi dengan lintas sektoral
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah menu pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat yang dilaksanakan	Menu	7	1.895.735.802,00	7	1.645.481.800,00	100,00	86,80	Masih dalam kondisi pandemi COVID-19	Melaksanakan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pos UKK yang terbentuk	Pos	24	118.167.020,00	20	45.009.900,00	83,33	38,09	Terbatasnya anggaran dan juga adanya aturan tidak bisa berkumpul terkait Pandemi COVID-19 yang sedang melanda	Tetap melakukan pembinaan terhadap pos UKK yang terbentuk dengan memedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pos UKK Terintegrasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa yang melaksanakan STBM	Desa/Kel	394	2.362.420.140,00	288	982.806.900,00	73,10	41,60	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19 dan adanya Larangan untuk berkerumun sehingga sangat sulit melaksanakan kegiatan STBM	Tetap melakukan pembinaan ke seluruh desa dengan memaksimalkan penggunaan dana BOK Puskesmas dan BOK Kabupaten dengan memedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan GERMAS	Kelompok	67	608.784.008,00	75	606.010.200,00	111,94	99,54	Kegiatan penyuluhan yang melibatkan orang banyak masih sulit dilakukan karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19	Tetap melaksanakan upaya promosi kesehatan dengan memaksimalkan dana BOK Puskesmas dan memperhatikan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional yang berkualitas	Unit	34	105.835.317,00	34	72.495.461,00	100,00	68,50	Masih dalam masa pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa pengelola pelayanan kesehatan tradisional (yankestrad) di Puskesmas menjadi vaksinator COVID-19 sehingga pelayanan yankestrad kurang maksimal dijalankan di puskesmas dan di desa	Petugas kesehatan di Puskesmas dan kader di desa berperan aktif dalam menjalankan pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas maupun di desa
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jenis penyakit yang dipantau	Jenis	4	2.260.065.858,00	4	1.479.869.121,00	100,00	65,48	Beberapa kecamatan memiliki gangguan jaringan telekomunikasi/di luar jangkauan	Tetap melaksanakan surveilans kesehatan di seluruh wilayah kerja Puskesmas dengan memanfaatkan seluruh petugas kesehatan yang menguasai aplikasi dan alat telekomunikasi

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Puskesmas	34	156.707.416,00	34	140.443.500,00	100,00	89,62	Belum Semua Puskesmas melayani Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis	Petugas kesehatan tetap melaksanakan skrining kepada penyalahgunaan Napza dan melakukan rehabilitasi medis
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan kesehatan khusus	Puskesmas	34	41.056.908,00	34	-	100,00	0,00	-	Puskesmas dan jaringannya tetap melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan perkesmas di masa pandemi dengan mengikuti SOP yang ada
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Jenis	7	3.512.310.090,00	25	2.866.668.900,00	357,14	81,62	Masih dalam kondisi pandemi COVID-19	Melaksanakan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang menerima bantuan iuran JKN dari APBD Kabupaten	Orang	179518	89.469.180.000,00	177122	83.667.306.800,00	98,67	93,52	Capaian belum 100% dikarenakan serapan dana untuk bantuan iuran PBPU Kelas 3 tidak tercapai serta serapan dana untuk anggaran pelayanan kesehatan unregisiter juga belum maksimal. Unregister baru berjalan di bulan Juli 2021 dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya pelayanan unregisiter di Kabupaten Deli Serdang	Meminta dukungan dari Bupati Deli Serdang dalam hal percepatan <i>Universal Health Coverege</i> (UHC) dan penganggaran alokasi dana untuk pengelolaan Jaminan Kesehatan
				Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah siswa/i yang mendapatkan penyuluhan tentang bahaya NAPZA	Orang	750	29.827.508,00	450	-	60,00	0,00	Masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga proses pembelajaran di sekolah belum berjalan tatap muka penuh.	Petugas kabupaten bersama petugas Puskesmas tetap melakukan penyuluhan tentang NAPZA ke SMU sederajat

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium	Puskesmas	2	3.720.000,00	34	-	1700,00	0,00	Pengambilan spesimen KLB sering terkendala akibat terlambat diketahui dan petugas pengambil spesimen belum menguasai penuh (tidak bersertifikat di bidangnya) sehingga tidak diperoleh spesimen penyebab dari KLB	Dinas Kesehatan memiliki tenaga kesehatan yaitu analis yang bersertifikat sehingga dengan demikian pengambilan spesimen penyakit potensial KLB dapat dikirim dan diperiksa ke laboratorium rujukan/nasional
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan program indonesia sehat dan pendekatan keluarga	Orang	70	330.472.967,00	70	225.499.285,00	100,00	68,24	Masih dalam kondisi pandemi COVID-19	Tetap menyelenggarakan kegiatan dengan memedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang mendapat operasional pelayanan rumah sakit	Unit	1	5.436.543.381,00	1	3.137.776.271,00	100,00	57,72	-	-
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang memperoleh operasional pelayanan	Puskesmas	34	94.251.512.154,00	34	72.204.767.387,00	100,00	76,61	-	-
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapat operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Fasyankes	2	877.646.764,00	2	661.229.180,00	100,00	75,34	-	-
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP yang terakreditasi	Unit	33	2.986.299.320,00	33	418.183.601,00	100,00	14,00	1. Dikarenakan pandemi COVID-19 untuk akreditasi perdana di Puskesmas Tuntungan tidak dapat dilaksanakan (sesuai edaran dari menteri kesehatan ditangguhkan) 2. Re-akreditasi (baik itu Puskesmas maupun RS) juga tidak dilaksanakan (sesuai edaran dari Menteri Kesehatan RI bahwa akreditasi ditangguhkan selama masa pandemi COVID-	Tetap dilakukan pembinaan akreditasi ke Puskesmas maupun RS dengan menggunakan Dana APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Puskesmas yang melakukan investigasi awal kejadian tidak diharapkan	Puskesmas	12	36.505.800,00	0	-	0,00	0,00	-	Belanja pada sub kegiatan ini merupakan belanja bersumber BOK Puskesmas. Dalam perjalanannya, Surveilans Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) Pelaksanaan Imunisasi Dasar dan Lanjutan pada sub kegiatan ini tidak direalisasikan karena dapat memanfaatkan kegiatan KIPI lainnya yang bersumber dari APBD

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) wabah	Puskesmas	34	54.807.888,00	34	-	100,00	0,00	Dalam pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) di Puskesmas, belum semua puskesmas melaksanakan pelaporan secara tepat waktu dan kelengkapan 100%. Hal ini disebabkan karena situasi pandemi COVID-19 dimana waktu dan perhatian petugas kesehatan tersita pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 seperti vaksinasi, pelacakan kasus, pendataan dan pelaporan tentang COVID-19. Di samping itu petugas banyak yang merangkap tugas serta sinyal telepon/jaringan yang masih lemah pada daerah tertentu.	Pembinaan serta monitoring evaluasi SKDR yang dilakukan petugas kabupaten di Puskesmas; Kkegiatan rutin berupa pertemuan di kabupaten dengan tujuan agar tercapai target yang ditentukan, dimana ketepatan dan kelengkapan di atas 90%, maka petugas pengelola SKDR diharapkan fokus terhadap pelaksanaan SKDR; Memfasilitasi petugas dalam melaksanakan kewaspadaan dini dan respon wabah
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase perencanaan program/kegiatan kesehatan yang evidenced based	%	92	993.586.197,00	100	899.713.491,00	108,70	90,55	Pengelola program yang ada pada setiap bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah kurang fokus dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga diperlukan fokus dalam upaya percepatan penanganan dan vaksinasi COVID-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan dalam upaya pengelolaan data dan informasi terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan	Tetap melakukan koordinasi dalam upaya pengelolaan data dan informasi lewat WA Group Forum Data Kesehatan dan secara rutin meminta pelaporan data melalui surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan evaluasi data capaian target kinerja	Orang	34	248.350.740,00	34	237.346.600,00	100,00	95,57	Pengelola program yang ada pada setiap bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah kurang fokus dalam pengelolaan data dan informasi akibat adanya upaya dalam mencapai target vaksinasi COVID-19. Hal ini juga menyebabkan beberapa kegiatan dalam upaya pengelolaan data dan informasi terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan	Tetap melakukan koordinasi dalam upaya pengelolaan data dan informasi lewat WA Group Forum Data Kesehatan dan secara rutin meminta pelaporan data melalui surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi kesehatan	Puskesmas	34	745.235.457,00	34	662.366.891,00	100,00	88,88	Proses pengadaan barang dan jasa Sistem Informasi Kesehatan terlalu lama dan sudah berada di penghujung tahun	Memaksimalkan waktu yang ada untuk proses pengadaan barang dan jasa Sistem Informasi Kesehatan dengan metode pengadaan langsung
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah sakit yang memenuhi standar mutu	%	65,22	2.171.822.900,00	77,27	1.857.017.280,00	118,48	85,51	Masih ada rumah sakit yang belum terakreditasi	Melakukan pembinaan terhadap seluruh rumah sakit yang ada di wilayah kerja Kabupaten Deli Serdang agar dapat memenuhi standar akreditasi dan mutu pelayanan yang ditetapkan
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rujukan yang berkualitas	Unit	57	2.171.822.900,00	56	1.857.017.280,00	98,25	85,51	Masih ada rumah sakit yang belum terakreditasi	Melakukan pembinaan terhadap seluruh rumah sakit yang ada di wilayah kerja Kabupaten Deli Serdang agar dapat memenuhi standar akreditasi dan mutu pelayanan yang ditetapkan
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,4	945.511.756,00	0,33	334.050.500,00	82,50	35,33	SDM Puskesmas harus membagi waktu kerja untuk pencegahan dan penanggulangan serta vaksinasi COVID-19 sehingga pelaksanaan intervensi keluarga cukup terbengkalai	1. Menggalang komitmen dari Kepala Puskesmas dalam pencapaian IKS termasuk pengalokasian dana dari BOK Puskesmas untuk melaksanakan intervensi keluarga serta didukung dengan Tim PIS-PK Kabupaten yang memonitor pelaksanaan serta pencapaian PIS-PK 2. Pembentukan Tim Bina Wilayah Binaan PIS-PK Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	%	100	141.038.236,00	100	108.576.980,00	100,00	76,98	1. SDM Puskesmas harus membagi waktu kerja untuk vaksinasi COVID-19 sehingga pelaksanaan intervensi keluarga cukup terbengkalai.	1. Menggalang komitmen dari Kepala Puskesmas dalam pencapaian IKS termasuk pengalokasian dana dari BOK Puskesmas untuk melaksanakan intervensi keluarga serta didukung dengan Tim PIS-PK Kabupaten yang memonitor pelaksanaan serta pencapaian PIS-PK 2. Pembentukan Tim Bina Wilayah Binaan PIS-PK Tahun 2022
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang terbaik	Orang	9	141.038.236,00	9	108.576.980,00	100,00	76,98	Keterlambatan pencairan dana mengakibatkan terlambat masuknya pertanggungjawaban di akhir tahun	Tetap melaksanakan pemilihan tenaga kesehatan terbaik karena di seluruh Puskesmas sudah ada sembilan jenis tenaga kesehatan yang ditingkatkan
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi teknis dan bersertifikat	%	27	804.473.520,00	33,70	225.473.520,00	124,81	28,03	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19 (mengalami <i>refocussing</i>)	Tetap mengusulkan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi SDM kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan bersertifikat baru berjumlah 509 orang (0,23%)
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan	Paket	107	804.473.520,00	180	225.473.520,00	168,22	28,03	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19 (mengalami <i>refocussing</i>)	Tetap mengusulkan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,4	207.084.070,00	0,33	-	82,50	0,00	SDM Puskesmas harus membagi waktu kerja untuk pencegahan dan penanggulangan serta vaksinasi COVID-19 sehingga pelaksanaan intervensi keluarga cukup terbengkalai	1. Menggalang komitmen dari Kepala Puskesmas dalam pencapaian IKS termasuk pengalokasian dana dari BOK Puskesmas untuk melaksanakan intervensi keluarga serta didukung dengan Tim PIS-PK Kabupaten yang memonitor pelaksanaan serta pencapaian PIS-PK 2. Pembentukan Tim Bina Wilayah Binaan PIS-PK Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi standar	%	100	85.152.080,00	100	-	100,00	0,00	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19 (mengalami refocussing)	Tetap melaksanakan kegiatan Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) melalui kegiatan bersumber dana DAK NF POM 2021
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pengelola obat apotek dan toko obat yang mendapatkan pembinaan	Orang	50	63.569.320,00	50	-	100,00	0,00	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19 (mengalami refocussing)	Tetap melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) melalui kegiatan bersumber dana DAK NF POM 2021
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pengusaha mengikuti kegiatan pengawasan apotek, toko obat, dan UMOT	Orang	60	21.582.760,00	60	-	100,00	0,00	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19 (mengalami refocussing)	Tetap melaksanakan kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) melalui kegiatan bersumber dana DAK NF POM 2021
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengelolaan makanan dan depot air minum yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	96	24.942.750,00	97	-	101,04	0,00	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19, (mengalami refocussing), dan pandemi COVID-19 yang membatasi langkah gerak dalam pengawasan untuk menerbitkan laik hygiene dan sanitasi TPM	Tetap melaksanakan upaya pembinaan ke depot air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air minum
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	Jumlah tempat pengelolaan makanan yang mendapat pembinaan dan pengawasan	Unit	175	24.942.750,00	145	-	82,86	0,00	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19 (mengalami refocussing) dan terhambatnya langkah gerak untuk melakukan pengawasan dalam penerbitan laik higiene sanitasi	Tetap melaksanakan upaya pembinaan ke tempat pengelolaan makanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan jajanan yang laik sehat	%	41	96.989.240,00	63	-	153,66	0,00	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19 dan juga tingginya kasus penularan covid-19 sehingga sulit untuk melakukan pembinaan pada kegiatan ini (mengalami refocussing)	Tetap melaksanakan upaya pembinaan ke tempat pengelolaan makanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1096 Tahun 2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Pengusaha Industri Rumah Tangga (P-IRT) makanan dan minuman yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Orang	75	96.989.240,00	75	-	100,00	0,00	Terbatasnya anggaran dikarenakan fokus penanganan COVID-19 dan mencegah terjadinya penularan covid-19 (mengalami refocussing)	Tetap melaksanakan upaya pembinaan ke tempat pengelolaan makanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1096 Tahun 2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,4	1.764.751.743,00	0,33	1.071.153.404,00	82,50	60,70	SDM Puskesmas harus membagi waktu kerja untuk pencegahan dan penanggulangan serta vaksinasi COVID-19 sehingga pelaksanaan intervensi keluarga cukup terbengkalai	1. Menggalang komitmen dari Kepala Puskesmas dalam pencapaian IKS termasuk pengalokasian dana dari BOK Puskesmas untuk melaksanakan intervensi keluarga serta didukung dengan Tim PIS-PK Kabupaten yang memonitor pelaksanaan serta pencapaian PIS-PK 2. Pembentukan Tim Bina Wilayah Binaan PIS-PK Tahun 2022
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	70,5	1.160.376.729,00	71	536.044.470,00	100,71	46,20	Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, beberapa kegiatan advokasi maupun kemitraan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan mengurangi jumlah jangkauan masyarakat yang dapat dibina	Tetap melaksanakan upaya pemberdayaan/kemitraan dengan masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan

KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Meningkatkan jumlah wilayah/area yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi kesehatan perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
2	Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Deli Serdang	Memberikan dukungan untuk pelaksanaan 5 (lima) kluster Germas di tiap kecamatan dan Kabupaten Deli Serdang Sebagai payung hukum bagi setiap OPD dan masyarakat dalam melakukan kegiatan 5 (lima) Kluster Germas Tiap kecamatan sudah membentuk Satgas Germas untuk mengkoordinir kegiatan 5 (lima) Kluster Germas di tiap kecamatan
3	Meningkatkan penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Pemerintah Terhadap Pasien Unregister Jaminan Kesehatan Nasional	Sebagai pedoman yang digunakan untuk pengelolaan dana jaminan pelayanan kesehatan untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi peserta unregister JKN
		Penetapan Tim Verifikasi Pelaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Pemerintah Terhadap Pasien Unregister Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021	Sebagai pedoman yang digunakan untuk pengelolaan dana jaminan pelayanan kesehatan untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi peserta unregister JKN
4	Meningkatkan Puskesmas dengan Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	SK Bupati Nomor 352 Tahun 2021 Tentang Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021	Dalam rangka pengajuan puskesmas menjadi Puskesmas BLUD yang bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPT. Puskesmas sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
5	Menurunkan kasus stunting pada balita	Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kelompok Kerja Percepatan Penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Deli Serdang	Dengan adanya keputusan bupati tentang kelompok kerja penetapan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi sehingga intervensi penanganan penanggulangan kematian ibu dan bayi yang dilakukan bisa lebih fokus
		Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Penetapan Desa Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	Dengan adanya keputusan bupati tentang penetapan desa lokus stunting sehingga intervensi penanganan penanggulangan stunting yang dilakukan bisa lebih fokus
6	Mencegah penyebaran dan percepatan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 173 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 214.A Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Deli Serdang	1. Upaya penekanan penyebaran kasus COVID-19 dan upaya pemulihan perekonomian daerah sebagai akibat dampak bencana pandemi COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang 2. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19
		Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 440/1593 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Keseluruhan Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2021 berisikan informasi tentang: - Penerapan Work From Home (WFH) di Perkantoran Sesuai Dengan Tingkatan Level di Kabupaten - Pemberian Informasi tentang Kriteria Zonasi Pengendalian Wilayah Hingga Tingkat Dusun/Lingkungan - Meningkatkan Protokol Kesehatan di Masyarakat, Penerapan 3 T (Testing, Tracing and Treatment) dan 5 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan, Mengurangi Mobilitas)
		Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 440/1671 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Deli Serdang	
		Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 440/1672 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		<p>Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 440/1778 Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Deli Serdang</p> <p>Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 440/3221 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019</p> <p>Instruksi Bupati Deli Serdang Nomor 440/3032 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019</p> <p>Surat Edaran Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 440/1482 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</p> <p>Surat Edaran Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 440/4478 Tentang Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi</p>	

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2020
DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021**

No	Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	<p>Pada saat pandemi COVID-19, dinas ini merupakan salah satu OPD penting dan ujung tombak pelayanan khususnya di bidang kesehatan. Dilaporkan pada tahun 2020 Dinas ini kinerjanya untuk indikator penilaian jumlah kematian ibu dengan capaian 107,69%, Angka Kematian Bayi (AKB) dengan capaian kinerja 127,86% dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 102,83%. Adapun capaian kinerja yang tidak mencapai 100% ditunjukkan pada prevalensi gizi buruk dengan capaian kinerja 80,43% dan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dengan kinerja 86,67%. Pansus memberikan apresiasi atas capaian kinerja ini dan diharapkan prestasi ini ditingkatkan</p>	<p>Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Deli Serdang tahun 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai AKIP.</p> <p>Ketiga IKU tersebut dijabarkan dalam program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 sesuai dengan Keppmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p>Masing-masing IKU memiliki target sebagai berikut: -IKS = 0,4 Poin -IKM = 82 Poin -Nilai AKIP = 72 Poin</p>	<p>Penetapan IKU dari program yang dikerjakan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 bertujuan untuk menyelaraskan sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan dan sasaran Bupati Deli Serdang sehingga dengan demikian pembangunan yang dikerjakan terintegrasi satu dengan yang lain yang juga dikerjakan oleh OPD lainnya.</p> <p>Dalam perjalanannya, di tengah-tengah pandemi COVID-19, Dinas Kesehatan berupaya maksimal agar seluruh IKU maupun target indikator kinerja lainnya dapat dicapai sesuai dengan tupoksi Dinas Kesehatan sehingga dapat menciptakan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang Sehat.</p> <p>Walaupun kegiatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 seperti vaksinasi, pelacakan kasus, pendataan dan pelaporan tentang COVID-19 sudah sangat banyak menyita waktu seluruh personil Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang beserta jajarannya, dan belum lagi kondisi bahwa dalam satu waktu petugas harus merangkap tugas, namun tetap tidak boleh menjadi alasan untuk abai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sekalipun kondisinya sangat sulit. Dari hasil evaluasi diperoleh bahwa pada tahun 2021, realisasi dan capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:</p> <p>-IKS = 0,33 Poin (Capaian = 82,5%) -IKM = 82,09 Poin (Capaian = 101,37%) -Nilai AKIP = 79,94 Poin (Capaian = 111,03%)</p> <p>Jadi dapat disimpulkan rata-rata capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 = 98,3%</p>
2	<p>Dinas ini waktu perubahan APBD melakukan penambahan belanja sebesar 1,01% dan pada saat realisasi anggaran hanya mampu terserap sebesar 86,66%. Pansus menyayangkan aspek perencanaan dinas ini yang kurang tepat dalam memprediksi kemampuan mengelola anggaran. Untuk tahun berjalan tahun 2021 agar ini menjadi perhatian dan pada akhir tahunnya tidak terjadi selisih yang lumayan besar</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Deli Serdang pada tahun 2021 menetapkan target dan indikator kinerja. Dalam penetapan target dan indikator kinerja tersebut, Dinas Kesehatan menyusun dokumen perencanaan yang berbasis kinerja dengan berdasarkan data evaluasi dan kebutuhan dari setiap pengelola program maupun UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dokumen perencanaan tersebut juga dilengkapi dengan POA dan RAK (Rencana Anggaran Kas) per subkegiatan dengan harapan TAPD dapat mengetahui kapan dan berapa besaran dana harus disediakan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang setiap bulan/triwulannya.</p>	<p>Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar Rp 539.452.081.914 yang terbagi dalam 35 sub unit yaitu 1 sub unit Dinas Kesehatan (bersama dengan RSUD Pancur Batu) dengan sumber dana APBD, APBN, DBH-CHT, EARMARKING DAU sebesar Rp 471.705.710.032,00 (termasuk gaji dan tunjangan) dan 34 sub unit Puskesmas dengan menggunakan sumber dana JKN Kapitasi/Non Kapitasi serta Tarif Pelayanan Umum/BLUD sebesar Rp 67.746.371.882,00.</p> <p>Namun karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, anggaran yang awalnya sudah dialokasikan harus mengalami refocussing. Selain itu, anggaran yang tersedia juga tidak sesuai dengan RAK yang sudah disusun sehingga banyak kegiatan yang baru terealisasi di akhir Triwulan IV tahun 2021.</p> <p>Dalam pengadaan barang/jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, adanya pergeseran anggaran akibat pandemi COVID-19 dan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/2757/Keuda tanggal 19 April 2021 hal Hasil Pemetaan (Mapping) dan Pemutakhiran Terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021 dan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/3017/keuda tanggal 28 April 2021 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dan DAK Nonfisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan T.A. 2021; Adanya pergantian PPK pengadaan barang/jasa; Adanya perubahan harga di E-Katalog LKPP sehingga harus diubah pada P. APBD T.A. 2021 sehingga waktu pelaksanaan semakin singkat dan beberapa penyedia tidak sanggup mengerjakan dengan waktu yang ada; Adanya penyedia yang semula menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan, ternyata di akhirnya menyatakan tidak sanggup mengerjakan dengan batas waktu yang sudah ditentukan; Adanya gangguan server ULP dan LKPP sehingga menghambat kelancaran pekerjaan.</p> <p>Namun demikian untuk mengejar waktu, Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang tetap berkomitmen untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan dengan melakukan proses pengadaan yang lebih terencana, tepat dan cepat; Melakukan proses e-katalog terhadap</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
3	<p>Terdapat permasalahan pada saat pandemi dimana masyarakat takut berobat (utamanya suspect Tb) ke fasilitas kesehatan dikarenakan takut didiagnosa COVID-19. Ketakutan tersebut bukan tanpa alasan dikarenakan banyak kasus yang demikian. Dewan berharap kinerja tenaga medis lebih profesional mengutamakan keselamatan tenaga medis dan pasien. Namun perlu kajian di saat ketakutan masyarakat ke pusat layanan medis justru berbagai indikator kesehatan justru lebih baik nilainya</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat di seluruh wilayah kerja Puskesmas agar masyarakat khususnya suspect Tuberculosis mau berkunjung ke fasyankes dalam agar mendapatkan pelayanan kesehatan tuberkulosis (TBC) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Masyarakat yang ada gejala TBC diedukasi untuk menampung dahaknya dan melapor kepada kader TBC agar dahaknya diantar ke fasyankes untuk pemeriksaan TBC selanjutnya.</p> <p>Sedangkan bagi petugas kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam memberikan pelayanan dan memberikan edukasi kepada pasien yang berobat ke fasyankes</p>	<p>Peningkatan promosi kesehatan bagi lintas program dan lintas sektor; Penemuan kasus dan pelacakan kontak serumah oleh petugas kesehatan meningkat; Peningkatan skrining TB di tempat/populasi khusus; dan Seluruh desa/kelurahan memiliki Kader Peduli TBC</p>